



LAPORAN PENGELOLAAN RESIKO TRIBULAN I

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LAMONGAN

2026



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Jaks Agung Suprpto No. 41 Lamongan – Jawa Timur 62215,
Telp. (0322) 321323, Pos-el dinlh@lamongankab.go.id
Laman : www.lamongankab.go.id/dlh

Lamongan, 02 April 2026

Nomor : 700.1.2.7/ 226 /413.116 /2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan I Tahun 2026 Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan

Kepada

Yth. Bapak Bupati Lamongan

di -

L A M O N G A N

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan I Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten lamongan
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan



Erwin Sulistya Pambudu, S.T., M.M
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19770327 200312 1 006

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah
Kabupaten Lamongan ;
2. Unit Kepatuhan Resiko
Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamongan




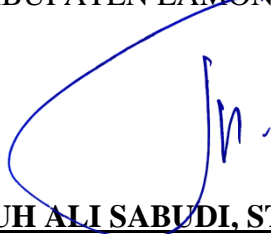
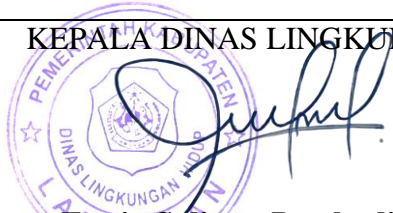
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 41 Lamongan – Jawa Timur 62215,

Telp. (0322) 321323, Pos-el dinlh@lamongankab.go.id

Laman : www.lamongankab.go.id/dlh

NO DOKUMEN	:	700.1.2.7/ 226 /413.116 /2026
TANGGAL TERBIT	:	02 April 2026

Disiapkan Oleh :	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI  <u>NUREKA YULIANI, ST</u> NIP. 19900709 201502 2 001
Diperiksa :	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN  <u>TEGUH ALI SABUDI, ST., M.M</u> NIP. 19750817 200112 1 007
Disahkan Oleh :	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  <u>Erwin Sulistya Pambudi, S.T., M.M</u> NIP. 19770327 200312 1 006

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Maka dari pada itu setiap Instansi Pemerintah diharuskan melakukan penilaian resiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko dalam tugas dan fungsinya.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing – masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktifitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, upaya implementasi management resiko Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan perlu dikembangkan lebih lanjut.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya

organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan Isebagaimana terlampir:

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan - kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah dan yang belum dilaksanakan adalah sebagaimana terlampir :

Kertas Kerja Strategis OPD

Kertas Kerja Strategis OPD Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan		
Tahun Penilaian	2026		
Periode yang dinilai	2026		
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	Dinas Lingkungan Hidup		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra 2025 – 2029 Dinas Lingkungan Hidup		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan		
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup 2. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah 		
IKU Renstra OPD		IKU	KET
	1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	69.61
	2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	78.87
	3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	59.01
	4.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	49.5
	5.	Nilai SAKIP DLH	87.8
	6.	Nilai IKM DLH	88.3
	7.	Nilai MR DLH	79.2
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup • Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup • Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) • Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) • Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat • Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Persampahan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 		

Kertas Kerja Operasional OPD

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan		
Tahun Penilaian	2026		
Periode yang Dinilai	2026		
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup		
OPD yang Dinilai	Dinas Lingkungan Hidup		
Sumber Data	Renja Dinas Lingkungan Hidup 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan		
Renja Dinas Lingkungan Hidup 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 9. Program Pengelolaan Persampahan 10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 		
Keluaran/ Hasil Keluaran		Kegiatan	Peserta
	1.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	2.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	9 Titik
	3.	Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.27 Ha
	4.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	367.64 m2
	5.	Penyimpanan Sementara Limbah B3	19 Pelaku Usaha/Kegiatan
	6.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35 %
	7.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	264 desa/kel

	Kabupaten/Kota	
8.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	15 Entitas
9.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %
10.	Pengelolaan Sampah	38.99 %
11.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
12.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
13.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
14.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
16.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Risiko Prioritas

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian		2026					
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup					
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup							
1	Ketidak Efektifan Perencanaan Kegiatan dalam Perencanaan target nilai IKLH	RSO 26.11.116.01	1. Pedoman Perhitungan IKLH 2. Dokumen RPJMD/Renstra	Pengendalian yang ada hanya menetapkan "Angka Target", tetapi tidak ada penjabaran secara teknis	Penyusunan Kajian Strategi berbasis analisis data tren (data-driven) dan pemetaan masalah spesifik	Kepala Dinas	April
2	Ketidakefektifan intervensi kegiatan fisik di lapangan dalam menurunkan beban pencemaran di titik pantau	RSO 26.11.116.02	Pemantauan Kualitas Lingkungan Rutin	Pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup cenderung berjalan linier	Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	Kepala Dinas	Januari s/d Desember
3	Kegagalan identifikasi akar masalah spesifik dalam proses evaluasi kinerja IKLH	RSO 26.11.116.03	1. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium berupa Sertifikat hasil uji dari lab terakreditasi 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP)	Pengendalian yang ada (LKjIP/Rapat) hanya membahas status (Tercapai/Tidak Tercapai) dan dengan alasan umum	Penerapan Metode Evaluasi berbasis Bedah Data Parameter	Kepala Dinas	Desember

Risiko Operasional OPD Dinas Lingkungan Hidup							
1	Adanya pengabaian dari hasil monitoring sehingga tidak terpakai sebagai bahan perbaikan	ROO 26.11.116.01	Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) atau aplikasi e-Monev (SIMELA, SIMARIO) untuk penginputan data	Penginputan data capaian kinerja ke dalam aplikasi masih dilakukan secara manual di akhir periode (bukan real-time), sehingga rentan human error atau data tertinggal	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilakukan secara kontinu disertai validasi data langsung	Sekretaris	Januari s/d Oktober
2	Keterlambatan penyajian laporan kinerja pada periode berjalan	ROO 26.11.116.02	Pengecekan data oleh staf perencanaan saat data masuk	Belum adanya format baku atau template pengumpulan data kinerja yang seragam antar bidang, sehingga data yang masuk sering tidak konsisten	Membuat dan menetapkan Template Kertas Kerja Pengumpulan Data Kinerja (berbasis Spreadsheet/Excel terkunci)	Sekretaris	April
3	Inkonsistensi antara Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (Renstra) dengan Perencanaan Tahunan (Renja) dan Penganggaran (RKA)	ROO 26.11.116.03	1. Proses reuiu eksternal oleh Bappeda sebelum dokumen disahkan. 2. Penggunaan Aplikasi SIPD RI: Sistem informasi yang mengunci nomenklatur program agar sesuai kamus data	Proses verifikasi internal seringkali mengejar deadline input sistem, sehingga tidak dilakukan penyandingan data (cross-check) secara detail antara target Renstra vs Renja	ensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretaris	Juli
4	Tidak terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	ROO 26.11.116.04	Penggunaan aplikasi sistem informas terpusat dan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan	Kurang lancarnya sistem SIPD terhadap proses administrasi keuangan utamanya pembayaran gaji dan tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi pegawai ASN secara tepat waktu	Sekretaris	Januari s/d Desember
5	Kesalahan penyajian Laporan Keuangan	ROO 26.11.116.05	Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan (SIPD) secara terpusat untuk penatausahaan	Rekonsiliasi Internal tidak berjalan substantif	Penguatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretaris	Desember

6	Ketidaksinkronan data realisasi fisik dan keuangan pada pelaporan periodik	ROO 26.11.116.06	Penggunaan aplikasi SIPD sebagai Sistem pencatatan anggaran	Belum optimalnya mekanisme rekonsiliasi internal secara periodik	Penguatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sekretaris	Januari s/d Desember
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak optimal	ROO 26.11.116.07	Melakukan analisis kebutuhan rutin berdasarkan data penggunaan historis dan proyeksi kebutuhan	Perencanaan yang tidak akurat	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretaris	Maret s/d November
8	Terganggunya kelancaran operasional akibat ketidakstabilan pasokan listrik dan pencahayaan yang tidak standar	ROO 26.11.116.08	Himbauan mematikan alat elektronik yang tidak digunakan	Perbaiki insidental tidak menyelesaikan masalah akar	Peningkatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretaris	April s/d September
9	SDM & Partisipasi tidak maksimal	ROO 26.11.116.09	Mengirimkan undangan jauh-jauh hari; memastikan adanya disposisi pimpinan; melakukan konfirmasi kehadiran; serta memastikan materi yang dibahas relevan	Tidak ada checklist persiapan, pengawasan inventaris lemah, atau permintaan mendadak tanpa perencanaan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretaris	Maret s/d Agustus
10	Pengaturan Pemenang Lelang	ROO 26.11.116.10	Pengadaan wajib melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)	Persyaratan lelang yang dibuat terlalu spesifik/mengunci	Transparansi Persyaratan: Mewajibkan review persyaratan lelang oleh pihak independen untuk memastikan tidak ada indikasi mengunci	Sekretaris	Mei
11	Mark-up Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	ROO 26.11.116.11	Mekanisme review dan penetapan HPS oleh atasan PPK/Kepala SKPD	Review HPS bersifat formalitas tanpa pengujian kewajaran harga	Wajib menggunakan katalog elektronik (e-katalog) atau data harga pasar terkini minimal dari 3 sumber terpercaya	Sekretaris	Mei

12	Pengadaan Barang Tidak Sesuai Spesifikasi	ROO 26.11.116.12	Pemeriksaan fisik barang oleh PPHP/PjPHP	Penerimaan barang/jasa dilakukan tanpa melibatkan pengguna akhir	Perketat Penerimaan: Wajib melibatkan pengguna akhir (pihak yang akan menggunakan BMD tersebut) dalam tim PPHP/PjPHP	Sekretaris	Mei
13	Pembayaran jasa tidak sesuai realisasi (overpayment)	ROO 26.11.116.13	SOP verifikasi pembayaran - Approval berjenjang	Pemeriksaan sering hanya administratif	Menerapkan dual-approval untuk pembayaran	Sekretaris	Januari s/d Desember
14	Manipulasi laporan layanan (absensi petugas, output kerja, laporan kebersihan/perawatan)	ROO 26.11.116.14	<ul style="list-style-type: none"> - Pengecekan oleh pengawas internal - Laporan harian penyedia jasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti lapangan tidak selalu tersedia - Tidak ada audit Mendadak 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan verifikasi digital (foto/video geotagged) - Pengawasan lapangan acak (spot check) - Audit layanan berkala 	Sekretaris	Januari s/d Desember
15	Penyalahgunaan fasilitas telekomunikasi (telepon kantor, paket data, internet)	ROO 26.11.116.15	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan akun, password 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem monitoring penggunaan tidak aktif - Pengawasan manual 	<ul style="list-style-type: none"> - Membatasi kuota/pemakaian - Sistem alert penggunaan tidak normal - Penegakan aturan penggunaan fasilitas 	Sekretaris	Januari s/d Desember
16	Penggelembungan Biaya Jasa dan Suku Cadang Pemeliharaan	ROO 26.11.116.16	Prosedur pengajuan klaim didukung kuitansi/faktur pajak resmi.	Bengkel/penyedia jasa tidak terdaftar/terverifikasi, sehingga harga tidak terkontrol	Mewajibkan review teknis independen (oleh Unit Pengelola Aset atau Tim Teknis Mekanik) atas seluruh suku cadang yang diganti sebelum pembayaran	Sekretaris	Januari s/d Desember

17	Klaim Pemeliharaan Fiktif/Pemeliharaan Kendaraan Pribadi	ROO 26.11.116.17	Verifikasi nomor polisi (nopol) dan nomor rangka kendaraan pada setiap kuitansi	Kuitansi manipulatif yang mencantumkan nopol kendaraan dinas padahal perbaikan dilakukan pada kendaraan pribadi	Wajib melampirkan foto/video milestone perbaikan (sebelum perbaikan, proses penggantian suku cadang, dan setelah perbaikan) yang menunjukkan nopol kendaraan dinas	Sekretaris	Januari s/d Desember
18	Pembayaran Termin Ganda atau Pembayaran Mendahului Prestasi Pekerjaan	ROO 26.11.116.18	Pembayaran termin didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Progress Lapangan	Berita Acara Pemeriksaan dibuat secara rekayasa (tidak sesuai kondisi lapangan)	Sertifikat pembayaran wajib ditandatangani oleh 3 pihak: Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan PjPHP, dan diverifikasi lagi oleh PPK sebelum diajukan ke Bendahara	Sekretaris	Mei
19	Keterbatasan data dan informasi awal yang relevan untuk dasar penyusunan KLHS dan IKPLHD	ROO 26.11.116.19	Permintaan data resmi kepada OPD terkait (secara surat). Pemanfaatan data sekunder yang tersedia	Tidak adanya mekanisme validasi dan sinkronisasi data antar OPD secara formal dan terbuka di tahap awal perencanaan	Konsultansi publik dengan melibatkan tim pokja KLHS dan IKPLHD	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Juni
20	Kajian analisis dan perumusan rekomendasi kurang mendalam	ROO 26.11.116.20	Review internal oleh tim teknis dan koordinator substansi. Konsultasi awal dengan dinas lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur	Data dasar tidak tervalidasi.	Perbaikan konsep dokumen KLHS dan IKPLHD	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Juni

21	Integrasi KLHS dalam muatan KRP RDTR	ROO 26.11.116.21	Koordinasi KLHS Kabupaten/Kota. Keterlibatan Bappeda dan DLH dalam proses awal penyusunan dokumen teknis. FGD dan konsultasi publik penyusunan RDTR yang melibatkan penyusun KLHS	Belum adanya SOP baku yang memaksa integrasi KLHS → RDTR. Rekomendasi KLHS sering tidak diterjemahkan ke dalam variabel teknis (KDB/KLB/KDH, zona lindung). Tidak ada mekanisme monitoring integrasi setelah KLHS selesai.	Mengintegrasikan dokumen KLHS dengan dokumen teknis (Dokumen RDTR atau RPJMD)	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Oktober
22	Keterlambatan Pengumpulan Data, Kesalahan dalam perhitungan Emisi	ROO 26.11.116.22	Permintaan data resmi kepada OPD terkait (secara surat). Pemanfaatan data sekunder yang tersedia	Tidak adanya mekanisme validasi dan sinkronisasi data antar OPD secara formal dan terbuka di tahap awal perencanaan	Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan pihak terkait dengan diadakannya desk	Kepala Bidang Tata Lingkungan	November
23	Kesulitan dalam Koordinasi Antar Lembaga, Perubahan Kebijakan atau Regulasi, Kajian analisis dan perumusan rekomendasi kurang mendalam	ROO 26.11.116.23	Review internal oleh tim teknis dan koordinator substansi	Data dasar tidak tervalidasi	perbaikan konsep penyusunan GRK dengan menggunakan data terupdate	Kepala Bidang Tata Lingkungan	November
24	Target GRK belum terpenuhi	ROO 26.11.116.24	Konsultasi awal dengan dinas lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur	Data dasar tidak tervalidasi.	perbaikan konsep penyusunan GRK dengan menggunakan data terupdate	Kepala Bidang Tata Lingkungan	November

25	Terhambatnya perluasan cakupan wilayah aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim atau berseri	ROO 26.11.116.25	1. pendampingan rutin pada lokasi yang sudah mendapat sertifikat Proklamasi 2. Mengirimkan surat pemberitahuan ke Kecamatan agar desa-desa mengusulkan diri	Surat edaran sering tidak dibaca detail atau tidak dipahami urgensinya oleh Kepala Desa tanpa penjelasan tatap muka.	Sosialisasi Program Kampung Iklim ke Wilayah Baru di Kabupaten Lamongan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	April
26	Pemahaman yang kurang tentang Proklamasi Berseri di tingkat masyarakat dapat menyebabkan ketidaktertarikan atau resistensi terhadap program	ROO 26.11.116.26	Melakukan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan melalui berbagai media	Membentuk forum koordinasi yang melibatkan semua pihak terkait untuk merumuskan dan menyelesaikan isu-isu bersama	Sosialisasi Program Kampung Iklim ke Wilayah Baru di Kabupaten Lamongan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	April
27	Terhambatnya pengumpulan data yang memadai	ROO 26.11.116.27	Mencukupi data Kualitatif dan data kuantitatif dengan penambahan data skunder	Kesesuaian kecukupan data yang ada	Melakukan verifikasi lapangan dan pengecekan data secara berkala	Kepala Bidang Tata Lingkungan	April
28	Keterbatasan kendaraan bermotor yang melakukan uji emisi	ROO 26.11.116.28	Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor	Tidak ada mekanisme kerjasama dengan OPD lain	Koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Januari s/d Desember
29	Keterbatasan sarana dan prasarana uji emisi	ROO 26.11.116.29	Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor	Tidak ada mekanisme kerjasama dengan OPD lain	Koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana uji emisi kendaraan bermotor	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Januari s/d Desember

30	Hasil pembacaan alat uji emisi tidak akurat	ROO 26.11.116.30	Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor	Tidak ada mekanisme kerjasama dengan OPD lain	Koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan kalibrasi alat uji emisi kendaraan bermotor	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Januari s/d Desember
31	Kondisi lapangan yang tidak sesuai pada saat dilaksanakan pengambilan sampel (sampling) kualitas air dan udara	ROO 26.11.116.31	Menjadwalkan kegiatan sampling	Cuaca dan kondisi lapangan yang tidak mendukung saat pelaksanaan sampling	Penjadwalan ulang sampling kualitas air dan udara	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Januari s/d Desember
32	Alat sampling tidak berfungsi dengan baik	ROO 26.11.116.32	Melakukan checklist/pengecekan perlengkapan alat sampling sebelum kegiatan pemantuan air dan udara dilakukan	Tidak dilakukan pengecekan terhadap fungsi alat saat akan dilaksanakan sampling kualitas air dan udara	Melakukan checklist perlengkapan dan kalibrasi alat sampling sebelum kegiatan pemantuan air dan udara dilakukan	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Januari s/d Desember
33	Contoh uji/sampel hilang atau tumpah	ROO 26.11.116.33	Melakukan kegiatan sampling kualitas air dan udara secara cermat dan hati-hati	Kondisi lapangan dan petugas yang kurang optimal	Kegiatan sampling dilakukan lebih dari satu orang untuk melakukan sampling dan mengamankan sampel	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Januari s/d Desember
34	Ketidakkuratan penentuan lokasi prioritas dan metode pemulihan	ROO 26.11.116.34	Survei Pendahuluan berupa Kunjungan lapangan staf OPD	Belum adanya dokumen perencanaan teknis atau studi kelayakan pemulihan yang spesifik sebelum penganggaran. Pengendalian yang ada masih bersifat umum.	Pelaksanaan Rehabilitasi meliputi langkah verifikasi teknis, pembersihan lahan, hingga penanaman/pemulihan sesuai standar yang sesuai	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Januari s/d Desember

35	Kegagalan fungsi fisik hasil rehabilitasi	ROO 26.11.116.35	Penggunaan Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Spesifikasi Teknis: Dokumen yang mengatur standar pekerjaan.	Pengawasan cenderung bersifat administratif	Pelaksanaan Rehabilitasi menyertakan rekam pemeliharaan yang ketat	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	April s/d Juni
36	Hasil rehabilitasi tidak berkelanjutan (unsustainable) atau kembali rusak	ROO 26.11.116.36	Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev): Laporan berkala triwulanan/tahunan	Mekanisme evaluasi bersifat pasif (hanya pelaporan) dan tidak terintegrasi dengan mekanisme respon cepat (koreksi)	Pelaksanaan Rehabilitasi dengan menindaklanjuti Hasil Evaluasi berupa Pelaksanaan Rehabilitasi Lanjutan/Pemeliharaan.	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Juni s/d September
37	Revitalisasi dilakukan pada area RTH yang mengalami penurunan fungsi ekologis, estetika, maupun sosial.	ROO 26.11.116.37	mekanisme perencanaan proses identifikasi area RTH yang membutuhkan revitalisasi, penetapan prioritas lokasi berdasarkan kondisi ekologis dan kebutuhan penataan	belum optimalnya mekanisme identifikasi kondisi awal RTH, sehingga beberapa area yang membutuhkan penanganan cepat tidak selalu terdeteksi secara komprehensif.	Melakukan pembaruan data dan pemetaan digital secara berkala untuk mengidentifikasi area RTH yang membutuhkan revitalisasi.	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Oktober s/d Desember
38	menyediakan tambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui proses pembangunan baru pada area yang sebelumnya belum memiliki fungsi ruang hijau.	ROO 26.11.116.38	penerapan standar teknis yang mencakup pemilihan jenis tanaman, desain tata hijau, penyediaan sarana pendukung, serta pengaturan pola ruang yang ramah lingkungan.	belum optimalnya integrasi data perencanaan lahan, sehingga informasi terkait ketersediaan lahan, status kepemilikan, dan kecocokan fungsi ruang tidak selalu terpetakan secara akurat.	Menetapkan SOP pembangunan RTH yang lebih rinci dan seragam, mulai dari pemilihan jenis vegetasi, desain taman, hingga standar kualitas pekerjaan.	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	April s/d Juni

39	Penanganan yang dimaksud meliputi kegiatan seperti pembersihan area, pemangkasan dan perawatan tanaman, penanaman kembali vegetasi lokal, serta pemulihan kondisi ekosistem yang mengalami degradasi.	ROO 26.11.116.39	melakukan pendataan kondisi lahan KEHATI dan RTH untuk mengetahui tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta potensi ekologis yang harus dipulihkan	keterbatasan sumber daya manusia dan sarana kerja menyebabkan kegiatan penanganan tidak selalu dapat dilaksanakan secara rutin	Melakukan pembaruan data lahan KEHATI dan RTH secara berkala melalui survei lapangan, pemetaan SIG, dan dokumentasi visual	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Juli s/d September
40	melakukan identifikasi ketersediaan lahan yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai RTH, baik lahan milik pemerintah maupun lahan hasil kerja sama dengan pihak lain.	ROO 26.11.116.40	Review internal dokumen perencanaan Sebelum pembangunan dimulai, dokumen perencanaan (gambar kerja, RAB, dan spesifikasi teknis) telah dilakukan pemeriksaan awal oleh pejabat teknis atau tim verifikator untuk memastikan kelengkapan dasar.	Belum ada standar atau checklist baku untuk review dokumen perencanaan, sehingga setiap verifikator memeriksa berdasarkan pemahaman masing-masing, yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman hasil pemeriksaan.	Membuat daftar periksa yang memuat item wajib seperti kelengkapan gambar kerja, kesesuaian RAB, spesifikasi teknis, data pendukung, serta keselarasan antar dokumen.	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Juli s/d September
41	Terdapat pelaku usaha yang tidak mengelolakan limbah B3-nya ke pengelola limbah pihak ke 3	ROO 26.11.116.41	Melakukan penjelasan kepada pelaku usaha terkait pelaporan festronik	Pelaku usaha terlambat melakukan pelaporan	Pelaku usaha terlambat melakukan pelaporan	Pendampingan pelaporan festronik kepada pelaku usaha	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

42	Kekurangan Dokumen Persyaratan dari Pemohon	ROO 26.11.116.42	Mengadakan sosialisasi terkait PPLH	- Tidak semua pemohon ikut sosialisasi, sehingga masih banyak yang tidak menerima informasi. - Materi sosialisasi mungkin tidak diperbarui, sehingga tidak sesuai dengan regulasi atau sistem terbaru. - Pelaksanaan sosialisasi tidak rutin, sehingga jangkauan informasinya terbatas. - Penyampaian materi kurang efektif, membuat pemohon tetap kurang memahami persyaratan.	Memperbarui materi sesuai regulasi terbaru.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	September
43	Tingginya tingkat ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban teknis dan administratif Perizinan Lingkungan	ROO 26.11.116.43	Pengawasan reguler ke pelaku usaha dan mengunggah peraturan di website/sosial media OPD	Pengawasan dan Teguran bersifat represif bukan preventif	Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Agustus
44	Peningkatan volume sampah yang masuk landfill TPA	ROO 26.11.116.44	Melakukan pengawasan pengolahan sampah menggunakan tungku pembakar sampah dan melakukan uji emisi	Pemilahan sampah tidak konsisten, sehingga sampah basah tercampur dan mengurangi efektivitas pembakaran.	Pengolahan sampah dengan pengadaan tungku pembakar sampah	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Mei

45	Gangguan operasional pengelolaan sampah di TPA	ROO 26.11.116.45	Melakukan verifikasi kepemilikan lahan dan melakukan appraisal harga tanah	Penolakan masyarakat di sekitar lahan yang akan dibebaskan	Pembebasan lahan untuk penggunaan TPA	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Juni
----	--	------------------	--	--	---------------------------------------	---	------

RTP Risk

Formulir Kertas Kerja

Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
Risiko Strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup:									
1	Ketidakefektifan perencanaan kegiatan dalam perencanaan target nilai IKLH.	RSO 26.11.116.01	1. Pedoman Perhitungan IKLH 2. Dokumen RPJMD/Renstra	Pengendalian yang ada hanya menetapkan "Angka Target", tetapi tidak ada penjabaran secara teknis	Penyusunan Kajian Strategi berbasis analisis data tren (data-driven) dan pemetaan masalah spesifik	Kepala Dinas	April	April	https://intip.in/ckrG
2	Ketidakefektifan intervensi kegiatan fisik di lapangan dalam menurunkan beban pencemaran di titik pantau	RSO 26.11.116.02	Pemantauan Kualitas Lingkungan Rutin	Pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup cenderung berjalan linier	Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	Kepala Dinas	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG
3	Kegagalan identifikasi akar masalah spesifik dalam proses evaluasi kinerja IKLH	RSO 26.11.116.03	1. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium berupa Sertifikat hasil uji dari lab terakreditasi 2. Laporan	Pengendalian yang ada (LKjIP/Rapat) hanya membahas status (Tercapai/Tidak	Penerapan Metode Evaluasi berbasis Bedah Data Parameter	Kepala Dinas	Desember	Desember	https://intip.i

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
			Akuntabilitas Kinerja (LKjIP)	Tercapai) dan dengan alasan umum					
Risiko Operasional OPD Dinas Lingkungan Hidup:									
1	Adanya pengabaiaan dari hasil monitoring sehingga tidak terpakai sebagai bahan perbaikan	ROO 26.11.116.01	Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) atau aplikasi e-Monev (SIMELA, SIMARIO) untuk penginputan data	Penginputan data capaian kinerja ke dalam aplikasi masih dilakukan secara manual di akhir periode (bukan real-time), sehingga rentan human error atau data tertinggal	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilakukan secara kontinu disertai validasi data langsung	Sekretaris	Januari s/d Oktober	Januari s/d Oktober	https://intip.in/ckrG
2	Keterlambatan penyajian laporan kinerja pada periode berjalan	ROO 26.11.116.02	Pengecekan data oleh staf perencanaan saat data masuk	Belum adanya format baku atau template pengumpulan data kinerja yang seragam antar bidang, sehingga data yang masuk sering tidak konsisten	Membuat dan menetapkan Template Kertas Kerja Pengumpulan Data Kinerja (berbasis Spreadsheet/Excel terkunci)	Sekretaris	April	April	https://intip.in/ckrG
3	Inkonsistensi antara Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (Renstra)	ROO 26.11.116.03	1. Proses reuiu eksternal oleh Bappeda sebelum dokumen	Proses verifikasi internal seringkali	Konsistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Sekretaris	Juli	Juli	https://intip.in/ckrG

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
	dengan Perencanaan Tahunan (Renja) dan Penganggaran (RKA)		disahkan. 2. Penggunaan Aplikasi SIPD RI: Sistem informasi yang mengunci nomenklatur program agar sesuai kamus data	mengejar deadline input sistem, sehingga tidak dilakukan penyandingan data (cross-check) secara detail antara target Renstra vs Renja	Perangkat Daerah				
4	Tidak terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	ROO 26.11.116.04	Penggunaan aplikasi sistem informas terpusat dan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan	Kurang lancarnya sistem SIPD terhadap proses administrasi keuangan utamanya pembayaran gaji dan tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi pegawai ASN secara tepat waktu	Sekretaris	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG
5	Kesalahan penyajian Laporan Keuangan	ROO 26.11.116.05	Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan (SIPD) secara terpusat untuk penatausahaan	Rekonsiliasi Internal tidak berjalan substantif	Penguatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretaris	Desember	Desember	https://intip.in/ckrG
6	Ketidaksinkronan data realisasi fisik dan keuangan pada pelaporan periodik	ROO 26.11.116.06	Penggunaan aplikasi SIPD sebagai Sistem pencatatan	Belum optimalnya mekanisme rekonsiliasi	Penguatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Sekretaris	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
			anggaran	internal secara periodik	Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak optimal	ROO 26.11.116.07	Melakukan analisis kebutuhan rutin berdasarkan data penggunaan historis dan proyeksi kebutuhan	Perencanaan yang tidak akurat	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretaris	Maret s/d November	Maret s/d November	https://intip.in/ckrG
8	Terganggunya kelancaran operasional akibat ketidakstabilan pasokan listrik dan pencahayaan yang tidak standar	ROO 26.11.116.08	Himbauan mematikan alat elektronik yang tidak digunakan	Perbaikan insidentil tidak menyelesaikan masalah akar	Peningkatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretaris	April s/d September	April-September	https://intip.in/ckrG
9	SDM & Partisipasi tidak maksimal	ROO 26.11.116.09	Mengirimkan undangan jauh-jauh hari; memastikan adanya disposisi pimpinan; melakukan konfirmasi kehadiran; serta memastikan materi yang dibahas relevan	Tidak ada checklist persiapan, pengawasan inventaris lemah, atau permintaan mendadak tanpa perencanaan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretaris	Maret s/d Agustus	Maret s/d Agustus	https://intip.in/ckrG
10	Pengaturan Pemenang Lelang	ROO 26.11.116.10	Pengadaan wajib melalui Sistem	Persyaratan lelang yang	Transparansi Persyaratan:	Sekretaris	Mei	Mei	https://intip.in/ckrG

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
			Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)	dibuat terlalu spesifik/mengunci	Mewajibkan review persyaratan lelang oleh pihak independen untuk memastikan tidak ada indikasi mengunci				
11	Mark-up Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	ROO 26.11.116.11	Mekanisme review dan penetapan HPS oleh atasan PPK/Kepala SKPD	Review HPS bersifat formalitas tanpa pengujian kewajaran harga	Wajib menggunakan katalog elektronik (e-katalog) atau data harga pasar terkini minimal dari 3 sumber terpercaya	Sekretaris	Mei	Mei	https://intip.in/ckrG
12	Pengadaan Barang Tidak Sesuai Spesifikasi	ROO 26.11.116.12	Pemeriksaan fisik barang oleh PPHP/PjPHP	Penerimaan barang/jasa dilakukan tanpa melibatkan pengguna akhir	Perketat Penerimaan: Wajib melibatkan pengguna akhir (pihak yang akan menggunakan BMD tersebut) dalam tim PPHP/PjPHP	Sekretaris	Mei	Mei	https://intip.in/ckrG

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
13	Pembayaran jasa tidak sesuai realisasi (overpayment)	ROO 26.11.116.13	- SOP verifikasi pembayaran - Approval berjenjang	- Pemeriksaan sering hanya administratif	- Menerapkan dual-approval untuk pembayaran	Sekretaris	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG
14	Manipulasi laporan layanan (absensi petugas, output kerja, laporan kebersihan/perawatan)	ROO 26.11.116.14	- Pengecekan oleh pengawas internal - Laporan harian penyedia jasa	- Bukti lapangan tidak selalu tersedia - Tidak ada audit mendadak	- Menerapkan verifikasi digital (foto/video geotagged) - Pengawasan lapangan acak (spot check) - Audit layanan berkala	Sekretaris	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG
15	Penyalahgunaan fasilitas telekomunikasi (telepon kantor, paket data, internet)	ROO 26.11.116.15	- Pembatasan akun, password	- Sistem monitoring penggunaan tidak aktif - Pengawasan manual	- Membatasi kuota/pemakaian - Sistem alert penggunaan tidak normal - Penegakan aturan penggunaan fasilitas	Sekretaris	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG
16	Penggelembungan Biaya Jasa dan Suku Cadang Pemeliharaan	ROO 26.11.116.16	Prosedur pengajuan klaim didukung kuitansi/faktur pajak resmi.	Bengkel/penyedia jasa tidak terdaftar/terverifikasi, sehingga harga tidak terkontrol	Mewajibkan review teknis independen (oleh Unit Pengelola Aset atau Tim Teknis Mekanik) atas seluruh suku cadang	Sekretaris	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
					yang diganti sebelum pembayaran				
17	Klaim Pemeliharaan Fiktif/Pemeliharaan Kendaraan Pribadi	ROO 26.11.116.17	Verifikasi nomor polisi (nopol) dan nomor rangka kendaraan pada setiap kuitansi	Kuitansi manipulatif yang mencantumkan nopol kendaraan dinas padahal perbaikan dilakukan pada kendaraan pribadi	Wajib melampirkan foto/video milestone perbaikan (sebelum perbaikan, proses penggantian suku cadang, dan setelah perbaikan) yang menunjukkan nopol kendaraan dinas	Sekretaris	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG
18	Pembayaran Termin Ganda atau Pembayaran Mendahului Prestasi Pekerjaan	ROO 26.11.116.18	Pembayaran termin didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Progress Lapangan	Berita Acara Pemeriksaan dibuat secara rekayasa (tidak sesuai kondisi lapangan)	Sertifikat pembayaran wajib ditandatangani oleh 3 pihak: Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan PjPHP, dan diverifikasi lagi oleh PPK sebelum diajukan ke Bendahara	Sekretaris	Mei	Mei	https://intip.in/ckrG

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
19	Keterbatasan data dan informasi awal yang relevan untuk dasar penyusunan KLHS dan IKPLHD	ROO 26.11.116.19	Permintaan data resmi kepada OPD terkait (secara surat). Pemanfaatan data sekunder yang tersedia	Tidak adanya mekanisme validasi dan sinkronisasi data antar OPD secara formal dan terbuka di tahap awal perencanaan	Konsultansi publik dengan melibatkan tim pokja KLHS dan IKPLHD	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Juni	Juni	https://intip.in/ckrG
20	Kajian analisis dan perumusan rekomendasi kurang mendalam	ROO 26.11.116.20	Review internal oleh tim teknis dan koordinator substansi. Konsultasi awal dengan dinas lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur	Data dasar tidak tervalidasi.	Perbaikan konsep dokumen KLHS dan IKPLHD	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Juni	Juni	https://intip.in/ckrG
21	Integrasi KLHS dalam muatan KRP RDTR	ROO 26.11.116.21	Koordinasi KLHS Kabupaten/Kota. Keterlibatan Bappeda dan DLH dalam proses awal penyusunan dokumen teknis. FGD dan konsultasi publik penyusunan RDTR yang melibatkan penyusun KLHS	Belum adanya SOP baku yang memaksa integrasi KLHS → RDTR Rekomendasi KLHS sering tidak diterjemahkan ke dalam variabel teknis (KDB/KLB/KDH , zona lindung). Tidak ada	Mengintegrasikan dokumen KLHS dengan dokumen teknis (Dokumen RDTR atau RPJMD)	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Oktober	Oktober	https://intip.in/ckrG

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
				mekanisme monitoring integrasi setelah KLHS selesai.					
22	Keterlambatan Pengumpulan Data, Kesalahan dalam perhitungan Emisi	ROO 26.11.116.22	Permintaan data resmi kepada OPD terkait (secara surat). Pemanfaatan data sekunder yang tersedia	Tidak adanya mekanisme validasi dan sinkronisasi data antar OPD secara formal dan terbuka di tahap awal perencanaan	Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan pihak terkait dengan diadakannya desk	Kepala Bidang Tata Lingkungan	November	November	https://intip.in/ckrG
23	Kesulitan dalam Koordinasi Antar Lembaga, Perubahan Kebijakan atau Regulasi, Kajian analisis dan perumusan rekomendasi kurang mendalam	ROO 26.11.116.23	Review internal oleh tim teknis dan koordinator substansi	Data dasar tidak tervalidasi	perbaiki konsep penyusunan GRK dengan menggunakan data terupdate	Kepala Bidang Tata Lingkungan	November	November	https://intip.in/ckrG
24	Target GRK belum terpenuhi	ROO 26.11.116.24	Konsultasi awal dengan dinas lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur	Data dasar tidak tervalidasi.	perbaiki konsep penyusunan GRK dengan menggunakan data terupdate	Kepala Bidang Tata Lingkungan	November	November	https://intip.in/ckrG
25	Terhambatnya perluasan cakupan wilayah aksi adaptasi	ROO 26.11.116.25	1. pendampingan rutin pada lokasi yang sudah	Surat edaran sering tidak dibaca detail	Sosialisasi Program Kampung Iklim	Kepala Bidang Tata Lingkungan	April	April	https://intip.in/ckrG

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
	dan mitigasi perubahan iklim atau berseri		mendapat sertifikat Proklamasi 2. Mengirimkan surat pemberitahuan ke Kecamatan agar desa-desa mengusulkan diri	atau tidak dipahami urgensinya oleh Kepala Desa tanpa penjelasan tatap muka.	ke Wilayah Baru di Kabupaten Lamongan				
26	Pemahaman yang kurang tentang Proklamasi Berseri di tingkat masyarakat dapat menyebabkan ketidaktertarikan atau resistensi terhadap program	ROO 26.11.116.26	Melakukan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan melalui berbagai media	Membentuk forum koordinasi yang melibatkan semua pihak terkait untuk merumuskan dan menyelesaikan isu-isu bersama	Sosialisasi Program Kampung Iklim ke Wilayah Baru di Kabupaten Lamongan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	April	April	https://intip.in/ckrG
27	Terhambatnya pengumpulan data yang memadai	ROO 26.11.116.27	Mencukupi data Kualitatif dan data kuantitatif dengan penambahan data skunder	Kesesuaian kecukupan data yang ada	Melakukan verifikasi lapangan dan pengecekan data secara berkala	Kepala Bidang Tata Lingkungan	April	April	https://intip.in/ckrG
28	Keterbatasan kendaraan bermotor yang melakukan uji emisi	ROO 26.11.116.28	Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor	Tidak ada mekanisme kerjasama dengan OPD lain	Koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
29	Keterbatasan sarana dan prasarana uji emisi	ROO 26.11.116.29	Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor	Tidak ada mekanisme kerjasama dengan OPD lain	Koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana uji emisi kendaraan bermotor	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG
30	Hasil pembacaan alat uji emisi tidak akurat	ROO 26.11.116.30	Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor	Tidak ada mekanisme kerjasama dengan OPD lain	Koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan kalibrasi alat uji emisi kendaraan bermotor	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG
31	Kondisi lapangan yang tidak sesuai pada saat dilaksanakan pengambilan sampel (sampling) kualitas air dan udara	ROO 26.11.116.31	Menjadwalkan kegiatan sampling	Cuaca dan kondisi lapangan yang tidak mendukung saat pelaksanaan sampling	Penjadwalan ulang sampling kualitas air dan udara	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG
32	Alat sampling tidak berfungsi dengan baik	ROO 26.11.116.32	Melakukan checklist/pengecekan perlengkapan alat sampling	Tidak dilakukan pengecekan terhadap fungsi alat saat akan	Melakukan checklist perlengkapan dan kalibrasi alat	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
			sebelum kegiatan pemantauan air dan udara dilakukan	dilaksanakan sampling kualitas air dan udara	sampling sebelum kegiatan pemantauan air dan udara dilakukan	dan Ruang Terbuka Hijau			
33	Contoh uji/sampel hilang atau tumpah	ROO 26.11.116.33	Melakukan kegiatan sampling kualitas air dan udara secara cermat dan hati-hati	Kondisi lapangan dan petugas yang kurang optimal	Kegiatan sampling dilakukan lebih dari satu orang untuk melakukan sampling dan mengamankan sampel	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG
34	Ketidakakuratan penentuan lokasi prioritas dan metode pemulihan	ROO 26.11.116.34	Survei Pendahuluan berupa Kunjungan lapangan staf OPD	Belum adanya dokumen perencanaan teknis atau studi kelayakan pemulihan yang spesifik sebelum penganggaran. Pengendalian yang ada masih bersifat umum.	Pelaksanaan Rehabilitasi meliputi langkah verifikasi teknis, pembersihan lahan, hingga penanaman/pemulihan sesuai standar yang sesuai	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG
35	Kegagalan fungsi fisik hasil rehabilitasi	ROO 26.11.116.35	Penggunaan Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Spesifikasi Teknis: Dokumen yang mengatur standar	Pengawasan cenderung bersifat administratif	Pelaksanaan Rehabilitasi menyertakan rekam pemeliharaan yang ketat	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	April s/d Juni	April s/d Juni	https://intip.in/ckrG

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
			pekerjaan.						
36	Hasil rehabilitasi tidak berkelanjutan (unsustainable) atau kembali rusak	ROO 26.11.116.36	Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev): Laporan berkala triwulanan/tahunan	Mekanisme evaluasi bersifat pasif (hanya pelaporan) dan tidak terintegrasi dengan mekanisme respon cepat (koreksi)	Pelaksanaan Rehabilitasi dengan menindaklanjuti Hasil Evaluasi berupa Pelaksanaan Rehabilitasi Lanjutan/Pemeliharaan.	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Juni s/d September	Juni s/d September	https://intip.in/ckrG
37	Revitalisasi dilakukan pada area RTH yang mengalami penurunan fungsi ekologis, estetika, maupun sosial.	ROO 26.11.116.37	mekanisme perencanaan proses identifikasi area RTH yang membutuhkan revitalisasi, penetapan prioritas lokasi berdasarkan kondisi ekologis dan kebutuhan penataan	belum optimalnya mekanisme identifikasi kondisi awal RTH, sehingga beberapa area yang membutuhkan penanganan cepat tidak selalu terdeteksi secara komprehensif.	Melakukan pembaruan data dan pemetaan digital secara berkala untuk mengidentifikasi area RTH yang membutuhkan revitalisasi.	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Oktober s/d Desember	Oktober s/d Desember	https://intip.in/ckrG
38	menyediakan tambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui proses pembangunan baru	ROO 26.11.116.38	penerapan standar teknis yang mencakup pemilihan jenis tanaman, desain	belum optimalnya integrasi data perencanaan lahan, sehingga	Menetapkan SOP pembangunan RTH yang lebih rinci dan	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang	April s/d Juni	April s/d Juni	https://intip.in/ckrG

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
	pada area yang sebelumnya belum memiliki fungsi ruang hijau.		tata hijau, penyediaan sarana pendukung, serta pengaturan pola ruang yang ramah lingkungan.	informasi terkait ketersediaan lahan, status kepemilikan, dan kecocokan fungsi ruang tidak selalu terpetakan secara akurat.	seragam, mulai dari pemilihan jenis vegetasi, desain taman, hingga standar kualitas pekerjaan.	Terbuka Hijau			
39	Penanganan yang dimaksud meliputi kegiatan seperti pembersihan area, pemangkasan dan perawatan tanaman, penanaman kembali vegetasi lokal, serta pemulihan kondisi ekosistem yang mengalami degradasi.	ROO 26.11.116.39	melakukan pendataan kondisi lahan KEHATI dan RTH untuk mengetahui tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta potensi ekologis yang harus dipulihkan	keterbatasan sumber daya manusia dan sarana kerja menyebabkan kegiatan penanganan tidak selalu dapat dilaksanakan secara rutin	Melakukan pembaruan data lahan KEHATI dan RTH secara berkala melalui survei lapangan, pemetaan SIG, dan dokumentasi visual	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Juli s/d September	Juli s/d September	https://intip.in/ckrG
40	melakukan identifikasi ketersediaan lahan yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai RTH, baik lahan milik pemerintah maupun lahan hasil kerja sama dengan pihak lain.	ROO 26.11.116.40	Review internal dokumen perencanaan Sebelum pembangunan dimulai, dokumen perencanaan (gambar kerja, RAB, dan spesifikasi teknis) telah dilakukan pemeriksaan awal	Belum ada standar atau checklist baku untuk review dokumen perencanaan, sehingga setiap verifikasi memeriksa berdasarkan pemahaman masing-masing,	Membuat daftar periksa yang memuat item wajib seperti kelengkapan gambar kerja, kesesuaian RAB, spesifikasi teknis, data pendukung, serta keselarasan antar dokumen.	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Juli s/d September	Juli s/d September	https://intip.in/ckrG

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
			oleh pejabat teknis atau tim verifikator untuk memastikan kelengkapan dasar.	yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman hasil pemeriksaan.					
41	Terdapat pelaku usaha yang tidak mengelolakan limbah B3-nya ke pengelola limbah pihak ke 3	ROO 26.11.116.41	Melakukan penjelasan kepada pelaku usaha terkait pelaporan festronik	Pelaku usaha terlambat melakukan pelaporan	Pelaku usaha terlambat melakukan pelaporan	Pendampingan pelaporan festronik kepada pelaku usaha	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Januari s/d Desember	https://intip.in/ckrG
42	Kekurangan Dokumen Persyaratan dari Pemohon	ROO 26.11.116.42	Mengadakan sosialisasi terkait PPLH	- Tidak semua pemohon ikut sosialisasi, sehingga masih banyak yang tidak menerima informasi. - Materi sosialisasi mungkin tidak diperbarui, sehingga tidak sesuai dengan regulasi atau sistem terbaru. - Pelaksanaan sosialisasi tidak rutin, sehingga jangkauan informasinya terbatas. -	Memperbarui materi sesuai regulasi terbaru.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	September	September	https://intip.in/ckrG

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
				Penyampaian materi kurang efektif, membuat pemohon tetap kurang memahami persyaratan.					
43	Tingginya tingkat ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban teknis dan administratif Perizinan Lingkungan	ROO 26.11.116.43	Pengawasan reguler ke pelaku usaha dan mengunggah peraturan di website/sosial media OPD	Pengawasan dan Teguran bersifat represif bukan preventif	Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Agustus	Agustus	https://intip.in/ckrG
44	Peningkatan volume sampah yang masuk landfill TPA	ROO 26.11.116.44	Melakukan pengawasan pengolahan sampah menggunakan tungku pembakar sampah dan melakukan uji emisi	Pemilahan sampah tidak konsisten, sehingga sampah basah tercampur dan mengurangi efektivitas pembakaran.	Pengolahan sampah dengan pengadaan tungku pembakar sampah	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Mei	Mei	https://intip.in/ckrG

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendal
45	Gangguan operasional pengelolaan sampah di TPA	ROO 26.11.116.45	Melakukan verifikasi kepemilikan lahan dan melakukan appraisal harga tanah	Penolakan masyarakat di sekitar lahan yang akan dibebaskan	Pembebasan lahan untuk penggunaan TPA	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Juni	Juni	https://intip.in/ckrG

Monitor Risk Event & RTP

Formulir Kertas Kerja

Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2026								
Tujuan Strategis Pemda		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan								
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup:										
1	Ketidakefektifan perencanaan kegiatan dalam perencanaan target nilai IKLH.	RSO 26.11.116.01	-	-	-	-	Penyusunan Kajian Strategi berbasis analisis data tren (data-driven) dan pemetaan masalah spesifik	-	-	-
2	Ketidakefektifan intervensi kegiatan fisik di lapangan dalam menurunkan beban pencemaran di titik pantau	RSO 26.11.116.02	-	-	-	-	Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	-	-	-
3	Kegagalan identifikasi akar masalah spesifik dalam proses evaluasi kinerja IKLH	RSO 26.11.116.03	-	-	-	-	Penerapan Metode Evaluasi berbasis Bedah Data Parameter	-	-	-
Risiko Operasional OPD Dinas Lingkungan Hidup:										
1	Adanya pengabaiaan dari hasil monitoring sehingga tidak terpakai sebagai bahan perbaikan	ROO 26.11.116.01	-	-	-	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilakukan secara	-	-	-

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2026								
Tujuan Strategis Pemda		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan								
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
							kontinu disertai validasi data langsung			
2	Keterlambatan penyajian laporan kinerja pada periode berjalan	ROO 26.11.116.02	-	-	-	-	Membuat dan menetapkan Template Kertas Kerja Pengumpulan Data Kinerja (berbasis Spreadsheet/Excel terkunci)	-	-	-
3	Inkonsistensi antara Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (Renstra) dengan Perencanaan Tahunan (Renja) dan Penganggaran (RKA)	ROO 26.11.116.03	-	-	-	-	Konsistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
4	Tidak terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	ROO 26.11.116.04	-	-	-	-	Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi pegawai ASN secara tepat waktu	-	-	-
5	Kesalahan penyajian Laporan Keuangan	ROO 26.11.116.05	-	-	-	-	Penguatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-
6	Ketidaksinkronan data	ROO 26.11.116.06	-	-	-	-	Penguatan	-	-	-

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2026								
Tujuan Strategis Pemda		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan								
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	realisasi fisik dan keuangan pada pelaporan periodik						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak optimal	ROO 26.11.116.07	-	-	-	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
8	Terganggunya kelancaran operasional akibat ketidakstabilan pasokan listrik dan pencahayaan yang tidak standar	ROO 26.11.116.08	-	-	-	-	Peningkatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-
9	SDM & Partisipasi tidak maksimal	ROO 26.11.116.09	-	-	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-
10	Pengaturan Pemenang Lelang	ROO 26.11.116.10	-	-	-	-	Transparansi Persyaratan: Mewajibkan review persyaratan lelang oleh pihak independen untuk memastikan	-	-	-

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2026								
Tujuan Strategis Pemda		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan								
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
							tidak ada indikasi mengunci			
11	Mark-up Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	ROO 26.11.116.11	-	-	-	-	Wajib menggunakan katalog elektronik (e-katalog) atau data harga pasar terkini minimal dari 3 sumber terpercaya	-	-	-
12	Pengadaan Barang Tidak Sesuai Spesifikasi	ROO 26.11.116.12	-	-	-	-	Perketat Penerimaan: Wajib melibatkan pengguna akhir (pihak yang akan menggunakan BMD tersebut) dalam tim PPHP/PjPHP	-	-	-
13	Pembayaran jasa tidak sesuai realisasi (overpayment)	ROO 26.11.116.13	-	-	-	-	- Menerapkan dual-approval untuk pembayaran	-	-	-
14	Manipulasi laporan layanan (absensi petugas, output kerja, laporan kebersihan/perawatan)	ROO 26.11.116.14	-	-	-	-	- Menerapkan verifikasi digital (foto/video geotagged) - Pengawasan lapangan acak (spot check) -	-	-	-

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Tahun Penilaian	2026									
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup									
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
							Audit layanan berkala			
15	Penyalahgunaan fasilitas telekomunikasi (telepon kantor, paket data, internet)	ROO 26.11.116.15	-	-	-	-	- Membatasi kuota/pemakaian - Sistem alert penggunaan tidak normal - - Penegakan aturan penggunaan fasilitas	-	-	-
16	Penggelembungan Biaya Jasa dan Suku Cadang Pemeliharaan	ROO 26.11.116.16	-	-	-	-	Mewajibkan review teknis independen (oleh Unit Pengelola Aset atau Tim Teknis Mekanik) atas seluruh suku cadang yang diganti sebelum pembayaran	-	-	-
17	Klaim Pemeliharaan Fiktif/Pemeliharaan Kendaraan Pribadi	ROO 26.11.116.17	-	-	-	-	Wajib melampirkan foto/video milestone perbaikan (sebelum perbaikan, proses penggantian	-	-	-

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Tahun Penilaian	2026									
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup									
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
							suku cadang, dan setelah perbaikan) yang menunjukkan nopol kendaraan dinas			
18	Pembayaran Termin Ganda atau Pembayaran Mendahului Prestasi Pekerjaan	ROO 26.11.116.18	-	-	-	-	Sertifikat pembayaran wajib ditandatangani oleh 3 pihak: Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan PjPHP, dan diverifikasi lagi oleh PPK sebelum diajukan ke Bendahara	-	-	-
19	Keterbatasan data dan informasi awal yang relevan untuk dasar penyusunan KLHS dan IKPLHD	ROO 26.11.116.19	-	-	-	-	Konsultasi publik dengan melibatkan tim pokja KLHS dan IKPLHD	-	-	-
20	Kajian analisis dan perumusan rekomendasi kurang mendalam	ROO 26.11.116.20					Perbaikan konsep dokumen KLHS dan IKPLHD	-	-	-
21	Integrasi KLHS dalam muatan KRP RDTR	ROO 26.11.116.21					Mengintegrasikan dokumen KLHS	-	-	-

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2026								
Tujuan Strategis Pemda		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan								
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
							dengan dokumen teknis (Dokumen RDTR atau RPJMD)			
22	Keterlambatan Pengumpulan Data, Kesalahan dalam perhitungan Emisi	ROO 26.11.116.22					Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan pihak terkait dengan diadakannya desk	-	-	-
23	Kesulitan dalam Koordinasi Antar Lembaga, Perubahan Kebijakan atau Regulasi, Kajian analisis dan perumusan rekomendasi kurang mendalam	ROO 26.11.116.23					perbaiki konsep penyusunan GRK dengan menggunakan data terupdate	-	-	-
24	Target GRK belum terpenuhi	ROO 26.11.116.24					perbaiki konsep penyusunan GRK dengan menggunakan data terupdate	-	-	-
25	Terhambatnya perluasan cakupan wilayah aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim atau berseri	ROO 26.11.116.25					Sosialisasi Program Kampung Iklim ke Wilayah Baru di Kabupaten Lamongan	-	-	-
26	Pemahaman yang kurang tentang Proklamasi Berseri di	ROO 26.11.116.26					Sosialisasi Program	-	-	-

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Tahun Penilaian	2026									
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup									
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	tingkat masyarakat dapat menyebabkan ketidaktertarikan atau resistensi terhadap program						Kampung Iklim ke Wilayah Baru di Kabupaten Lamongan			
27	Terhambatnya pengumpulan data yang memadai	ROO 26.11.116.27					Melakukan verifikasi lapangan dan pengecekan data secara berkala	-	-	-
28	Keterbatasan kendaraan bermotor yang melakukan uji emisi	ROO 26.11.116.28					Koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor	-	-	-
29	Keterbatasan sarana dan prasarana uji emisi	ROO 26.11.116.29					Koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana uji emisi kendaraan bermotor	-	-	-
30	Hasil pembacaan alat uji	ROO 26.11.116.30					Koordinasi dan	-	-	-

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Tahun Penilaian	2026									
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan									
Urusan Pemerintahan	Lingkungan Hidup									
Dinas Terkait	Dinas Lingkungan Hidup									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	emisi tidak akurat						kolaborasi dengan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan kalibrasi alat uji emisi kendaraan bermotor			
31	Kondisi lapangan yang tidak sesuai pada saat dilaksanakan pengambilan sampel (sampling) kualitas air dan udara	ROO 26.11.116.31					Penjadwalan ulang sampling kualitas air dan udara	-	-	-
32	Alat sampling tidak berfungsi dengan baik	ROO 26.11.116.32					Melakukan checklist perlengkapan dan kalibrasi alat sampling sebelum kegiatan pemantauan air dan udara dilakukan	-	-	-
33	Contoh uji/sampel hilang atau tumpah	ROO 26.11.116.33					Kegiatan sampling dilakukan lebih dari satu orang untuk melakukan sampling dan mengamankan sampel	-	-	-

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2026								
Tujuan Strategis Pemda		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan								
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
34	Ketidakakuratan penentuan lokasi prioritas dan metode pemulihan	ROO 26.11.116.34					Pelaksanaan Rehabilitasi meliputi langkah verifikasi teknis, pembersihan lahan, hingga penanaman/pemulihan sesuai standar yang sesuai	-	-	-
35	Kegagalan fungsi fisik hasil rehabilitasi	ROO 26.11.116.35					Pelaksanaan Rehabilitasi menyertakan rekam pemeliharaan yang ketat			
36	Hasil rehabilitasi tidak berkelanjutan (unsustainable) atau kembali rusak	ROO 26.11.116.36					Pelaksanaan Rehabilitasi dengan menindaklanjuti Hasil Evaluasi berupa Pelaksanaan Rehabilitasi Lanjutan/Pemeliharaan.			
37	Revitalisasi dilakukan pada area RTH yang mengalami penurunan fungsi ekologis, estetika, maupun sosial.	ROO 26.11.116.37					Melakukan pembaruan data dan pemetaan digital secara berkala untuk			

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2026								
Tujuan Strategis Pemda		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan								
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
							mengidentifikasi area RTH yang membutuhkan revitalisasi.			
38	menyediakan tambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui proses pembangunan baru pada area yang sebelumnya belum memiliki fungsi ruang hijau.	ROO 26.11.116.38					Menetapkan SOP pembangunan RTH yang lebih rinci dan seragam, mulai dari pemilihan jenis vegetasi, desain taman, hingga standar kualitas pekerjaan.			
39	Penanganan yang dimaksud meliputi kegiatan seperti pembersihan area, pemangkasan dan perawatan tanaman, penanaman kembali vegetasi lokal, serta pemulihan kondisi ekosistem yang mengalami degradasi.	ROO 26.11.116.39					Melakukan pembaruan data lahan KEHATI dan RTH secara berkala melalui survei lapangan, pemetaan SIG, dan dokumentasi visual			
40	melakukan identifikasi ketersediaan lahan yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai RTH, baik lahan milik	ROO 26.11.116.40					Membuat daftar periksa yang memuat item wajib seperti kelengkapan			

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2026								
Tujuan Strategis Pemda		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan								
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	pemerintah maupun lahan hasil kerja sama dengan pihak lain.						gambar kerja, kesesuaian RAB, spesifikasi teknis, data pendukung, serta keselarasan antar dokumen.			
41	Terdapat pelaku usaha yang tidak mengelolakan limbah B3-nya ke pengelola limbah pihak ke 3	ROO 26.11.116.41					Pelaku usaha terlambat melakukan pelaporan			
42	Kekurangan Dokumen Persyaratan dari Pemohon	ROO 26.11.116.42					Memperbarui materi sesuai regulasi terbaru.			
43	Tingginya tingkat ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban teknis dan administratif Perizinan Lingkungan	ROO 26.11.116.43					Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2026								
Tujuan Strategis Pemda		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan								
Urusan Pemerintahan		Lingkungan Hidup								
Dinas Terkait		Dinas Lingkungan Hidup								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
44	Peningkatan volume sampah yang masuk landfill TPA	ROO 26.11.116.44					Pengolahan sampah dengan pengadaan tungku pembakar sampah			
45	Gangguan operasional pengelolaan sampah di TPA	ROO 26.11.116.45					Pembebasan lahan untuk penggunaan TPA			

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Lingkungan Hidup berikut :

- Kurangnya Pemahaman terkait kegiatan pengelolaan risiko ;
- Kurangnya koordinasi antar lintas sektor ;
- Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya sehingga risiko pada kegiatan dapat diidentifikasi lebih dini dan terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I dapat disimpulkan bahwa perlu evaluasi sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.